

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Myanmar merupakan negara pada kawasan Asia Tenggara, terdapat 135 etnis yang berada di Myanmar namun ada etnis mayoritas etnis Rohingya seperti etnis *Burmese* hal ini berkaitan dengan konstitusi yang ditujukan dalam pengakuan terhadap warga negara yang mencakup warga negara Myanmar sepenuhnya, warga negara dengan asosiasi, dan bisa dengan tahap naturalisasi. Perlu dilihat dari kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016) karena negara Myanmar dipimpin oleh junta militer, walaupun pada perkembangannya negara Myanmar dipimpin oleh non-militer karena memenangkan pemilu tahun 2016. Keragaman Myanmar dengan penduduk yang padat, mewakili beragam kepercayaan dan dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Myanmar merupakan negara yang merdeka pada tahun 1948, sehingga perkembangan birokrasi negara tersebut masih sangat awal menjadi karakteristik negeri yang penuh dengan budaya melingkupi kajian pada periode junta militer (1990-2016) di Myanmar. Pergolakan dan penindasan hak asasi manusia masih terus terjadi dan masih belum bisa diselesaikan sehingga pada situasi tersebut muncul ibu demokrasi Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi, menjadi bagian dalam perkembangan partai demokrasi yang hadir saat itu yaitu NLD (*National League of Democracy*) yang mewarnai kebijakan pemerintahan di Myanmar.

Pada tahun 1948, Myanmar memasuki era penyusunan pemerintahan awal junta militer. Myanmar memiliki banyak masalah yang dimulai dari konflik etnis, junta militer yang kuat sehingga kebijakannya kurang merata di masyarakat. Perkembangan negara Myanmar cukup unik dimulai dari sistem kerajaan, masa kolonial Inggris sampai pada masa junta militer, sehingga dalam waktu yang cukup lama Myanmar mengalami banyak pergolakan dalam menata pemerintahannya. Pemerintahan yang beragam menimbulkan banyak masalah dalam sistem keamanan termasuk perhatian yang kurang

terhadap etnis minoritas. Khususnya mengenai etnis Rohingya di Myanmar. Jika ditelusuri lebih lanjut bahwa negara Myanmar memiliki etnis yang beragam. Kondisi sosial masyarakat Myanmar yang terdiri dari berbagai macam suku seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik.

Secara geografis negara Myanmar adalah negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Myanmar dikenal dengan nama Burma yang mencerminkan dominasi etnik Burma yang secara etnik dekat dengan Tibet dan China. Etnik Burma merupakan etnik yang mayoritas. Adapun etnik lainnya yaitu Karin, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin dan kelompok etnis lebih kecil lainnya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan gerakan separatis (Hidriyah, 2011, hlm. 5). Masyarakat yang multikultural dengan suku yang berbeda-beda bisa menyebabkan konflik, karena hal itu persatuan sulit diwujudkan. Pertentangan konflik itu tidak bisa lepas dari masalah sosial, ekonomi, maupun politik. Pertentangan tersebut tidak terlepas dari terjadinya perpecahan di Myanmar. Perpecahan yang terjadi membuat Myanmar menjadi negara yang ramai dengan berita-berita tentang perilaku tidak menyenangkan yang dialami oleh etnis Rohingya, ditambah dengan kurangnya dukungan pemerintah dalam pemerataan keadilan terhadap etnis minoritas termasuk etnis Rohingya yang kurang merata.

Pemerintah Myanmar belum mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya, karena menanggap kelompok Muslim tersebut bukan kelompok asli di negara Myanmar. Akan tetapi pada kenyataannya keberadaan etnis tersebut sudah ada sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Persiden Myanmar, Thein Sein dalam *Al Jazeera*, 29 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Myanmar tak mungkin memberikan hak kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh (Waluyo, 2013, hlm. 839).

Kurangnya perhatian terhadap etnis Rohingya di Myanmar menyebabkan etnis tersebut menjadi tidak memiliki tempat tinggal yang tepat dan menjadi sulit mengakses fasilitas negara. Sejarawan Jacques P. dalam Waluyo (2013) mengatakan bahwa pada abad 18 ada catatan seorang Inggris

yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang menyebutkan bahwa adanya masyarakat Muslim di Arakan dan menyebut diri mereka *rooinga* dan ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata *rahma* (rahmat) dalam bahasa Arab atau *rogha* (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada kaitan dengan wilayah Ruha di Afganistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya (Waluyo, 2013, hlm. 840). Dapat disimpulkan bahwa etnis Rohingya bukan etnis murni dari Myanmar, tapi etnis ini ada yang tinggal sebagai masyarakat muslim di Arakan dan menetap di sana untuk waktu yang cukup lama.

Konflik Rohingya berjalan berlarut-larut yang mana sampai sekarang belum menemui titik terang, salah satunya ketika ada tindakan kriminal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan tersebut antara lain dimulai dari kurang diperhatikannya kesejahteraan etnis Rohingya baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Selain itu, masih ada tindakan kekerasan, genosida, serta pemerkosaan. Hal ini pantas untuk diangkat sebagai topik permasalahan karena selain kurang tersedianya tempat tinggal untuk etnis Rohingya, kesulitan untuk menikmati fasilitas negara tidak bisa dilakukan dengan mudah, karena di Myanmar etnis Rohingya belum diakui keberadaannya dan dianggap sebagai etnis pendatang (tidak termasuk etnis asli masyarakat Myanmar).

Pada tahun 1948 Myanmar merdeka dan Arakan sebagai Muslim Rohingya tetap menjadi bagian dari negara Myanmar. Pada tahun 1962 Myanmar dikuasai oleh pemerintahan yang condong pada komunis China-Rusia. Junta militer berambisi menghabisi Muslim Rohingya. Peristiwa itu ditandai dengan terjadinya pengusiran Muslim Rohingya sejumlah tiga ratus ribu jiwa ke Bangladesh. Dan pada tahun 1978 lebih dari setengah juta Muslim Rohingya kembali diusir dari Myanmar (Waluyo, 2013, hlm. 841). Konflik yang muncul di Myanmar melibatkan antar etnis yang terjadi dalam kurun waktu 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal meledaknya konflik yang berkepanjangan, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas dan masalah identitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya antara lain disebabkan oleh status

mereka yang berbeda (Triono, 2014, hlm.6). Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa perang etnis di Myanmar cukup tinggi, khususnya yang terjadi pada etnis minoritas Rohingya di Arakan.

Sebagai contoh etnis minoritas masih belum menetap secara utuh di Myanmar beberapa pengungsi masih tinggal di Bangladesh sebagaimana diungkapkan oleh Hasugian pada berita *Tempo* tanggal 13 November 2018 bahwa:

“Repatirasi atau pemulangan kembali ratusan ribu pengungsi etnis Rohingya dari kamp di Bangladesh ke Myanmar yang dimulai pekan ini disambut oleh puluhan pengungsi dengan melarikan diri dari Kamp. Mereka menghindari dideteksi dan dipaksa pulang. Para pengungsi Rohingya beralasan khawatir keselamatan jiwa raga mereka jika harus kembali ke Myanmar. Yang mereka tuntut adalah pengakuan atas hak asasi mereka dan pemberian status warga negara Myanmar” (Hasugian, 2018 diakses dari <https://fokus.tempo.co/read/1145795/myanmar-bangladesh-mulai-repatirasi-rohingya-melarikan-diri/full&view=ok> ).

Berita tersebut menjelaskan bahwa sampai sekarang, etnis Rohingya masih belum kembali ke daerah Myanmar. Hal ini dikarenakan mereka khawatir akan nasibnya yang masih belum jelas di negara Myanmar, dan ada yang memilih tinggal di negara lain. Sebagai etnis minoritas pemenuhan kesejahteraan dalam bidang sosial, ekonomi, dan keamanan masih belum bisa dirasakan oleh etnis Rohingya sehingga lebih memilih mengungsi dengan cara migrasi ke negara lain contohnya adalah Bangladesh.

Etnis Rohingya lebih memilih menetap di negara lain selain Myanmar, hal ini dikemukakan oleh *VOA Indonesia* pada tanggal 23 Agustus 2018 bahwa:

“Kaum Rohingya yang selamat dari penyerangan bumi hangus Agustus tahun lalu mengatakan kepada para pekerja di Bangladesh mengenai kejahatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mereka menyaksikan orang-orang yang mereka kasih diperkosa dan dibunuh di depan mereka, dan desa mereka dibakar habis serta dipasang ranjau darat, hingga mereka tidak bisa kembali. Setengah juta warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada bulan pertama. Sekitar 200 ribu lebih menyusul beberapa bulan kemudian. Mereka masih bertahan di Cox’s Bazar, yang kini menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia” (Tanpa nama, 2018 diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/setahun-rohingya-melarikan-diri-myanmar-masih-belum-aman-/4542320.html>) .

Peristiwa tersebut berkaitan dengan masyarakat Rohingya yang tidak diperlakukan dengan adil tentu ada karena kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah Myanmar sehingga membuat etnis minoritas Rohingya masih tidak mau kembali ke Myanmar. Pemerintahan Myanmar tidak bisa terlepas dari peran junta militer yang kuat sampai sekarang, sehingga kebijakan junta militer terhadap etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016) menarik untuk dikaji. Peran militer yang kuat dalam pemerintahan Myanmar tidak bisa dilepaskan dari proses pembuatan kebijakan di negara tersebut.

Pemerintah Myanmar pada tahun 2016 kalangan sipil Myanmar dengan partai NLD memenangkan pemilu, hal tersebut menyebabkan pemerintah sipil mulai menunjukkan kekuasaan dalam menduduki pemerintahan. Aung San Suu Kyi tidak bisa naik sebagai perdana menteri karena memiliki status kewarganegaraan lain. Aung San Suu Kyi yang belum bisa menempati posisi perdana menteri akhirnya menjadi konselor penerangan. Tugas tersebut tidak kalah penting dengan perdana menteri karena keputusan yang dipegang oleh Perdana Menteri tidak terlepas dari Aung San Suu Kyi. Pemerintahan yang dipegang oleh masyarakat sipil tidak berarti menguasai seluruh pemerintahan karena personil masih belum melepas pemerintahan di Myanmar.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas terdapat permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu *bagaimana kebijakan junta militer terhadap etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016)?*, adapun pertanyaan dan rumusan masalah penelitian secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang permasalahan Etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016)?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah terhadap Etnis Rohingya (1990-2016)?
3. Bagaimana dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016)?
4. Bagaimana peran Dunia Internasional pada Kebijakan Pemerintah terhadap Etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian secara umum adalah mengetahui *kebijakan junta militer terhadap etnis Rohingya (1990-2016)*, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Menjelaskan latar belakang meneliti permasalahan Etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016).
2. Menjelaskan Kebijakan Pemerintahan terhadap Etnis Rohingya (1990-2016).
3. Memahami dampak dari Kebijakan Pemerintahan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016).
4. Memahami peran Dunia Internasional pada Kebijakan Pemerintah terhadap Etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian secara khusus yang penulis harapkan adalah sebagai berikut.

1. Menambah pengetahuan sejarah Kawasan di Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia khususnya ilmu mengenai topik Sejarah Asia.
2. Upaya pendokumentasian sebagai referensi bagi yang ingin mengetahui sejarah kawasan Asia Tenggara khususnya sejarah Myanmar.
3. Memberikan kontribusi dalam penulisan sejarah mengenai kebijakan junta militer terhadap etnis Rohingya.
4. Menambah informasi dan materi terkait mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas terutama di kelas 12 Sejarah dalam KD 3.6 Menganalisis konflik-konflik di Timur-Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan , Asia Timur, Eropa, Afrika dan Amerika Latin.

## 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci pada sub-sub bab. Pembahasan yang terdapat dalam bab satu dan lainnya akan saling berhubungan sehingga akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Alur skripsi ini akan ditulis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian penulis yang mengambil judul “Kebijakan Pemerintahan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016)”, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisikan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian yang diambil oleh penulis, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan dibahas. Literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian juga akan diuraikan dalam Bab ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah terhadap etnis Rohingya di Myanmar (1990-2016)”.

Bab IV Penemuan atau pembahasan. Bab ini akan menguraikan mengenai hasil temuan penulis selama melakukan penelitian. Hasil analisis penulis yaitu dengan mengaitkan antara hasil temuan dengan berbagai konsep, teori serta literatur yang telah ditulis pada bab II.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis penulis yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Bab ini juga akan menyertakan rekomendasi-rekomendasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan tema yang sama.